



► IPM KOTA JOGJA

Ketimpangan Pendapatan Jadi Tantangan

UMBULHARJO—Kota Jogja kembali meraih nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi nasional pada 2024. Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemkot Jogja Tahun 2024, IPM di Kota Jogja mencapai 89,1%.

Alfi Annissa Karin
alfi@harianjogja.com

Angka ini naik 0,55% jika dibandingkan dengan 2023 yang saat itu mencapai 88,61%. Selain IPM, dalam LPPD itu juga terdapat indikator kinerja pemerintah daerah lainnya yang dinilai, meliputi angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, hingga ketimpangan pendapatan atau gini ratio.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menuturkan capaian ini harus ditingkatkan. Dia juga mengingatkan jajaran Pemkot Jogja terkait dengan tantangan ke depan

► Hasto mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi, salah satunya menekan ketimpangan pendapatan.

► Secara umum, LPPD Pemkot Jogja 2024 sudah disusun sesuai dengan Permendagri No.19/2024.

yang tidak mudah. "Tantangan ke depan juga tidak mudah. IPM ataupun *Human Development Index* [HDI] di tahun ini akan bergeser menjadi *Human Capital Index* [HCI] atau Indeks Modal Manusia, dengan fokus yang lebih luas pada modal manusia dan potensi sumber daya manusia," ujar Hasto di Balai Kota Jogja, belum lama ini.

Meski capaian IPM Kota Jogja menjadi yang paling tinggi di Indonesia, Hasto mengatakan sejumlah tantangan masih akan dihadapi Kota Jogja ke depan. Salah satunya, tantangan dalam menekan ketimpangan pendapatan atau gini ratio di Kota Jogja yang tercatat berada pada angka 0,449% di 2024.

Angka tersebut turun 1,101% dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,454%. Untuk itu, Hasto menyebut Pemkot akan terus mendorong bergulirnya

ekonomi kerakyatan di Kota Jogja, salah satunya melalui koperasi. "Ekonomi di Kota Jogja harus ditopang oleh rakyat, bukan hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Contohnya melalui koperasi, kami akan mengoptimalkan untuk menggerakkan ekonomi berbasis kebersamaan, di mana manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang," kata Hasto.

Sementara, Inspektur Inspektorat Kota Jogja, Fitri Paulina Andriani, menuturkan catatan hasil reviu LPPD Pemkot Jogja Tahun 2024 telah selesai ditindaklanjuti. Dia mengatakan, secara umum LPPD Pemkot Jogja 2024 sudah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. "Untuk tindak lanjut dan perbaikan akan menjadi pedoman evaluasi Pemkot di tahun ini," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005